

## STRATEGI DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA ALAM BANTIMURUNG

Andi Afifah Faiza Asma<sup>1\*</sup>, Adnan Ma'ruf<sup>2</sup>, Nurbiah Tahir<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*This study aims to determine the Strategy for the Development of Bantimurung Natural Tourism Potential at the Tourism Office of Maros Regency. This type of research used is qualitative. phenomenological type. The data collection technique used is observation, interview. The results of this study indicate that the development strategy carried out by the Tourism Office is the need to improve the quality of human resources, such as increasing awareness in keeping the environment clean. There is provision of special funds by the Tourism Office specifically for Bantimurung tourism to finance and facilitate areas within the Bantimurung area and also to provide adequate facilities and infrastructure in the Bantimurung Nature Tourism area. The strategy for developing the natural tourism potential of Bantimurung at the Tourism Office uses several strategy indicators proposed by Chandler in (Rangkuti Freddy, 2006), namely 1) Human Resources, 2) Funds, 3) Information and Technology, 4) Facilities and Infrastructure.*

**Keywords:** *strategy, development, nature tourism potential*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam Bantimurung di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, strategi pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata yaitu perlunya meningkatkan kualitas SDM seperti meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Adanya penyediaan dana khusus oleh Dinas Pariwisata khusus untuk wisata Bantimurung guna membiayai dan memfasilitasi kawasan yang ada di dalam kawasan Bantimurung dan juga tercukupinya sarana dan prasarana di kawasan Wisata Alam Bantimurung. Strategi pengembangan potensi wisata alam Bantimurung di Dinas Pariwisata dengan menggunakan beberapa indikator strategi yang dikemukakan oleh Chandler dalam (Rangkuti Freddy, 2006) yaitu 1) Sumber Daya Manusia, 2) Dana, 3) Informasi dan Teknologi, 4) Sarana dan Prasarana.

**Kata kunci:** strategi, pengembangan, potensi wisata alam

---

\* andiafifah@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat bernilai ekonomi tinggi bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik dari dalam maupun dari luar negeri, disamping bernilai ekonomi yang tinggi, pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa sehingga akan tumbuh masyarakat yang lebih peduli terhadap suatu bangsa. Pariwisata adalah hal yang diminati oleh setiap individu, karena dapat menghilangkan kejenuhan, berkembangnya kreativitas dan mampu menunjang produktivitas suatu individu.

Jelas disini bahwa peranan pariwisata dalam pembangunan secara garis besar berintikan tiga segi yakni segi ekonomi (devisa, pajak-pajak), segi kerjasama antar Negara (persahabatan antarbangsa), segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan mancanegara). Kawasan Kabupaten Maros sangat terkenal dengan destinasi wisatanya yaitu Bantimurung. Selain itu, ternyata di Kabupaten Maros memiliki beberapa potensi wisata lainnya yang dapat dikembangkan terutama di Kawasan Bantimurung. Kawasan ini memiliki

potensi dalam bidang pariwisata yang sangat potensial di antaranya Air Terjun yang digunakan sebagai wisata permandian, kebun kupu-kupu, gua mimpi, hutan wisata, gua kristal, dan situs purbakala. Namun, potensi wisata tersebut belum secara optimal dikembangkan sehingga belum banyak wisatawan yang mengetahuinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengetahui potensi wisata yang ada di Desa Abangsongan dan mengetahui strategi pengembangan yang cocok.

Dasar hukum pengelolaan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengelolaan adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Pasal 6: Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata). Pasal 8: Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan

kepariwisataan kabupaten/kota. Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. (Pasal 11) Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan. serta (Pasal 12: 1) Aspek- aspek penetapan kawasan strategis pariwisata.

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung adalah kawasan konservasi yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 398/MenhutII/2004 tanggal 18 Oktober 2004. Sebagai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung mengemban fungsi sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.

Oleh karena itu, pentingnya peran pemerintah sebagai regulator dalam penerapan semua peraturan pemerintah

dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, Sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pemba ngunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata.

Dalam UU RI no 23 Tahun 2014 Pasal 9 (3) menjelaskan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Pasal 11 (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pasal 12 (3) urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 (1).

Berdasarkan Program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata yang ada. Dinas kebudayaan dan pariwisata Maros memiliki 2 objek wisata andalan yaitu Taman wisata alam Bantimurung dan taman prasejarah Leang-Leang. Pada tahun 2011, taman wisata alam Bantimurung memperoleh kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 3200 orang dan mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2015 mencapai 4000 orang. Sedangkan pada taman prasejarah Leang-Leang dimana pada tahun 2011 memperoleh kunjungan wisatawan mancanegara yaitu 750 orang, pada tahun 2015 meningkat mencapai 2000 orang. Hal ini tentu saja menegaskan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara dikedua tempat tersebut memang mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya. Selain dua objek wisata tersebut, Maros masih memiliki banyak sekali potensi wisata lain, tentu saja dibutuhkan berbagai macam strategi promosi guna memperkenalkan dan menginformasikan potensi tersebut. Harus diakui bahwa potensi yang sangat besar yang telah diuraikan diatas belum dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal. diperlukan upaya-upaya yang sistematis dan komprehensif dalam

menilai potensi wisata yang prospektif serta mengidentifikasi segala persoalan dan solusi yang selanjutnya dapat dijadikan bahan dalam menentukan arahan, strategi, program dan kegiatan dalam rangka pembangunan dan pengembangan pariwisata melalui perencanaan secara terpadu dan dikelola secara profesional dan berkesinambungan. Beberapa persoalan yang dihadapi antara lain.

Potensi pariwisata Bantimurung perlu dikembangkan dan dibina secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan usaha dan meratakan pendapatan yang pada akhirnya mampu menunjang pembangunan daerah kabupaten Maros.

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategia* (*stratos* = militer, dan *ag* = memimpin), yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Definisi tersebut juga dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Clausewitz, ia menyatakan bahwa strategi merupakan seni pertempuran untuk memenangkan perang (M. Ahman Syah, 2022).

Oleh karena itu tidak mengherankan apabila istilah strategi sering digunakan dalam kancah peperangan. Istilah strategi ini juga pertama kali digunakan di dunia militer. Kata strategi merupakan kata sifat yang menjelaskan implementasi strategi. Secara umum, kita mendefinisikan strategi sebagai cara mencapai tujuan serta memuat suatu rencana jangka panjang dalam mencapai tujuan.

Menurut Nawawi dari sudut etimologis berarti penggunaan kata “strategik” dalam manajemen sebuah organisasi dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terarah dan adanya tujuan strategis organisasi (Nawawi, 2003).

Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya (Hijrah, 2017).

Menurut Jhonson dan Scholes strategi merupakan arah cakupan organisasi yang secara ideal untuk jangka yang lebih panjang, yang menyesuaikan sumber dayanya dengan lingkungan yang berubah dan secara khusus dalam pasarnya dengan pelanggan dan kliennya untuk memenuhi harapan stakeholder (Qudrat Nugraha, 2014).

Menurut (Sugiono, 2011) pengembangan berarti suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu hasil produk tertentu, serta menguji keefektifan dari produk tersebut.

Menurut (Sunarto, 2013) pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual. Menurut Seels & Richey dalam Sumarno Pengembangan merupakan bentuk penjabaran proses secara spesifikasi dalam bentuk fitur fisik, pengembangan secara khusus menghasilkan sesuatu untuk dijadikan sebagai acuan. Sedangkan menurut Tessmer dan Richey pengembangan tidak hanya fokus pada analisis kebutuhan, tapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual. Pengembangan memiliki tujuan menghasilkan barang/produk

berdasarkan hasil yang ditemukan dilapangan.

Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata mencakup wisatawan/pelaku wisata (tourist) atau sebagai pekerja (employment). Peran SDM sebagai pekerja dapat berupa SDM di lembaga pemerintah, SDM yang bertindak sebagai pengusaha (wirausaha) yang berperan dalam menentukan kepuasan dan kualitas para pekerja, para pakar dan profesional yang turut berperan dalam mengamati, mengendalikan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan serta yang tidak kalah pentingnya masyarakat di sekitar kawasan wisata yang bukan termasuk ke dalam kategori di atas, namun turut menentukan kenyamanan, kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut. (Pajriah, 2018).

Dana dibutuhkan untuk memenuhi segala kebutuhan yang mendukung perkembangan pariwisata, seperti Dana alokasi khusus (DAK) fisik disektor pariwisata digunakan untuk pembangunan infastruktur sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik digunakan untuk pelatihan masyarakat lokal demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dengan prinsip penyelenggara kepariwisataan menunjang tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai konsep

hidup dalam keseimbangan hubungan anatara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia sesama manusia, dan hubungan manusi dengan lingkungan, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat.

Menurut para ahli bahasa, kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri atas dua suku kata, yaitu pari dan wisatawan. Pari berarti seluruh, semua dan penuh, wisata berarti perjalanan. Dengan demikian pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan penuh, yaitu berangkat dari suatu tempat, menuju dan singgah, di suatu di beberapa tempat, dan kembali ke tempat asal semula Istilah “pariwisata” konon untuk pertama kalinya digunakan oleh Presiden Soekarno dalam suatu percakapan padanan dari istilah asing tourism. pariwisata adalah segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan (Yoeti, 1996).

Pariwisata merupakan aspek yang sangat penting dalam memajukan suatu daerah. Dalam mengembangkan sektor pariwisata suatu daerah, sangat dibutuhkan strategi promosi yang baik dalam mendukung pemasaran daerah tersebut. Promosi didefinisikan sebagai segala bentuk komunikasi yang

digunakan untuk menginformasikan (*to inform*), membujuk (*to persuade*), atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga (Simamora, 2003:285), Dalam kasus ini merupakan potensi wisata yang ditawarkan guna menarik minat dan kunjungan wisatawan.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Dalam hal tersebut telah dijelaskan mengenai Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Kabupaten Maros merupakan daerah tujuan wisata yang mempunyai kawasan strategis pariwisata, (2) kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kawasan yang di dalamnya terbentuk daerah sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maros tahun 2012-2032, (3) kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tetapkan

dengan keputusan bupati.

Selanjutnya pasal 10 mengenai kawasan strategis pariwisata bahwa: (1) Kabupaten Maros merupakan daerah tujuan wisata yang mempunyai kawasan strategis pariwisata. (2) kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang di dalamnya terbentuk unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012-2032. (3) kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

## METODE

Lokasi penelitian ini ialah pada objek wisata alam Bantimurung Kabupaten Maros. Penentuan lokasi ini antara lain didasarkan atas pertimbangan bahwa Wisata alam Bantimurung merupakan tempat wisata yang mempunyai potensi sebagai wisata lokal. dan Karena Bantimurung merupakan suatu tempat yang cukup produktif sehingga perhatian dari pemerintah Kabupaten Maros perlu ditingkatkan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan atau yang menggambarkan tentang hal-hal yang mau diteliti yaitu mengenai peran pemerintah dalam pengembangan potensi wisata alam Bantimurung Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tipe Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Wisata Alam Bantimurung di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dan Model analisis data yang digunakan adalah model analisis intraktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, dan kesimpulan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisis data terdapat 4 proses yang saling berinteraksi (Sugiyono, 2015).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian pembahasan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan pembahasan terkait data yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan, baik dari observasi maupun

wawancara yang dilakukan hasil observasi mengenai Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam Bantimurung Di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros. Peneliti menggunakan teori Strategi Chandler dalam (Rangkuti Freddy, 2006) , yaitu: 1) Sumber Daya Manusia, 2) dana, 3) Informasi dan Teknologi dan 4) Sarana dan Prasarana.

### **Sumber Daya Manusia**

Objek wisata Bantimurung dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros dan di bantu oleh beberapa komunitas dalam mengembangkan wisata alam Bantimurung yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat atau sumber daya manusia itu sendiri. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dalam hal ini mengelola wisata alam Bantimurung, sangat perlu kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan pengelola obyek wisata itu sendiri dalam merencanakan dan pengembangan objek wisata ini ke depannya disamping itu sistem pengelolaan kolaboratif dimasukan dalam upaya pengembangan Kawasan Wisata Alam Bantimurung.

Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang sangat penting dalam memajukan potensi wisata suatu

daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros menyadari bahwa keterbatasan yang dimiliki saat ini harus mendapatkan solusi efektif yang mana akan berdampak baik pada kemajuan pariwisata serta kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dalam melibatkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Maros mengambil beberapa langkah :

Pengembangan wisata Bantimurung dalam hal pengelolaan bukan hanya pihak Dinas Kebudayaan Pariwisata yang melakukan pengelolaan Kolaboratif melainkan stakeholder yang bekerjasama dengan juga menerapkan pengelolaan kolaboratif yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dalam hal ini mengelola wisata alam Bantimurung, sangat perlu kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan pengelola obyek wisata itu sendiri dalam merencanakan dan pengembangan objek wisata ini ke depannya disamping itu sistem pengelolaan kolaboratif dimasukan dalam upaya pengembangan Kawasan Wisata Alam.

Mengenai sumber daya manusia, dapat dipahami bahwa Obyek wisata Bantimurung dari indikator sumber daya manusia, harus dilakukan strategi seperti meningkatkan kualitas SDM yang

memiliki komitmen dalam menghadapi persaingan di era informasi pasar bebas, Kehidupan manusia sendiri tidak bisa dipisahkan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial, maka sebagai individu harusnya segala aspek yang ada dalam masyarakat harus dapat menjaga kebersihan lingkungan. Kesadaran masyarakat ialah suatu yang dapat menunjang proses pengembangan pariwisata mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan sumber daya manusia yang baik sehingga dapat mendukung kelancaran pengelolaan dibidang pariwisata dan kerjasama sub regional dan regional, meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan pembinaan dan pelatihan untuk pengelolaan obyek-obyek wisata.

Salah satu bukti berkembangnya pariwisata adalah meningkatnya jumlah pengunjung nusantara maupun mancanegara yang datang, karna salah satu faktor utama obyek wisata bisa berkembang adalah sumber daya manusia. Berdasarkan data tabel yang peneliti dapatkan terjadi penurunan jumlah pengunjung pada tahun 2019, sehubungan dengan hasil wawancara dengan beberapa informan penurunan jumlah pengunjung terjadi karena faktor covid-19 yang menyebabkan banyak wisatawan mancanegara maupun nusantara yang membatalkan pesanan

penginapan untuk satu tahun terakhir.

### **Dana**

Dana merupakan hal yang sangat diperlukan dalam pariwisata yang dapat digunakan untuk fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdiri atas pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata dan peningkatan promosi pariwisata. Dana yang didapatkan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana. Menurut Harahap (Harahap, 2015) Dana dalam artian sempit adalah kas dan dalam artian yang lebih luas adalah modal kerja.

Bantimurung merupakan salah satu daerah di Kabupaten Maros yang sangat kaya dan memiliki daya tarik alam, daya Tarik budaya dan sejarah yang dapat dikemas dan dikembangkan sebagai tujuan pariwisata dengan mengangkat nilai lokal dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.

Dinas pariwisata sudah memberikan penyaluran dana langsung untuk pengembangan objek wisata Bantimurung. Sudah ada dana alokasi khusus untuk pariwisata khususnya obyek wisata Bantimurung yang didapatkan dari bantuan kementerian parekrif berupa DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik guna membiayai dan memfasilitasi kawasan yang ada di

dalam kawasan Bantimurung yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus maupun sarana dan prasarana yang merupakan urusan pemerintah daerah Kabupaten Maros dan sesuai dengan prioritas nasional.

Adanya pelaksanaan program perencanaan harus meliputi alur anggaran operasional pengelolaan guna mengembangkan Wisata Alam Bantimurung. Dana untuk pengelolaan Bantimurung guna pengembangan potensi wisata alam Bantimurung sudah di alokasikan dana khusus untuk biaya operasional maupun biaya perbaikan infrastruktur wisata dan sarana prasarana. Anggaran operasional juga sudah termasuk dengan pemberian upah kerja bagi pengelola Bantimurung yang bekerja dari dinas pariwisata itu sendiri. Pemasukan tambahan juga di dapatkan dari uang karcis maupun tiket masuk seta pendapatan dari wahana-wahana berbayar yang ada di dalam kawasan Bantimurung adapun pendapatan atau retribusi semua di setor ke pmda sebagai PAD.

### **Informasi dan Teknologi**

Dalam mengembangkan suatu objek wisata promosi adalah hal yang sangat penting dalam pariwisata, sektor pariwisata pun juga terbantu dengan perkembangan teknologi dan

komunikasi. Dinas Pariwisata Kabupaten Maros sudah maksimal dalam menggunakan Informasi dan teknologi dalam mempromosikan dan mengenalkan wisata Bantimurung dengan menggunakan sosial media dan memberikan gambaran semenarik mungkin guna menarik para pengunjung untuk berkunjung ke wisata Bantimurung.

Peran Teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor pariwisata cukup besar dan penting, dengan menggunakan teknologi informasi sebagai media mempromosikan suatu objek wisata disuatu daerah. Dalam mengembangkan suatu objek wisata promosi adalah hal yang sangat penting dalam pariwisata.

Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah peningkatan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana rekreasi, edukasi dan pengembangan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi promosi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata merupakan hal yang wajib dalam pariwisata dalam usaha meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang datang. Promosi juga termaksud dalam program kerja yang dilakukan pihak pengelola obyek wisata alam Bantimurung saat ini dikembangkan dalam strategi promosi oleh tata pengadministrasian melalui media sosial, blog, media cetak dan elektronik, pemasangan bener dan spanduk, hingga event-event yang menjadi sasaran untuk pemasaran objek wisata.

### **Sarana dan Prasarana**

Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam berwisata, tentunya adalah sarana dan prasarana pendukung wisata, pengunjung akan lebih nyaman dan lebih menikmati kegiatana berwisata apabila sarana dan prasarannya lengkap dan dapat digunakan dengan baik oleh pengunjung, untuk itu sarana dan prasarana dalam sebuah tempat pariwisata untuk pendukung wisata sangatlah penting.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai lebih memudahkan pihak pengelola untuk mengimplementasikan program yang sudah direncanakan. disamping itu sarana dan prasarana

adalah salah satu faktor pendukung dari sistem pengelolaan.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan Sarana dan prasarana pada obyek wisata Bantimurung sudah sangat memadai. Hasil informasi menunjukkan bahwa pengunjung sangat puas dengan pelayanan sarana prasarana yang ada di lokasi Bantimurung pengunjung juga merasakan perubahan yang ada, dalam hal ini peran pengelola dalam mengelola wisata khususnya penataan di lokasi Bantimurung sarana dan prasarana sudah sangat baik dan memuaskan pelayanan pengunjung, disamping itu sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk seluruh tempat wisata di Indonesia karena sangat mempengaruhi bagaimana kualitas tempat wisata itu sendiri.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil uraian pada bab sebelumnya bahwa peneliti berfokus pada Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam Bantimurung Di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros maka dapat disimpulkan bahwa: Objek wisata Bantimurung dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros dan di bantu oleh beberapa komunitas seperti komunitas GENPI (generasi pesona Indonesia) dan ada badan promosi pariwisata tiap

forum kemudian ada komunikasi darah daeng dalam mengembangkan wisata alam Bantimurung yang bertujuan untuk mengembangkan wisata alam Bantimurung. Mengenai sumber daya manusia, dapat dipahami bahwa Obyek wisata Bantimurung dari indikator sumber daya manusia, harus dilakukan strategi seperti meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kesadaran masyarakat ialah suatu yang dapat menunjang proses pengembangan pariwisata dibidang pariwisata dan kerjasama sub regional dan regional, meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan pembinaan dan pelatihan untuk pengelolaan obyek-obyek wisata. Dinas pariwisata sudah memberikan penyaluran dana langsung untuk pengembangan objek wisata Bantimurung. Sudah ada dana alokasi khusus untuk pariwisata khususnya obyek wisata Bantimurung yang didapatkan dari bantuan kementerian parekrif berupa DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik guna membiayai dan memfasilitasi kawasan yang ada di dalam kawasan Bantimurung yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus maupun sarana dan prasarana yang merupakan urusan pemerintah daerah Kabupaten Maros dan sesuai dengan prioritas nasional. Anggaran

operasional juga sudah termasuk dengan pemberian upah kerja bagi pengelola Bantimurung yang bekerja dari dinas pariwisata itu sendiri. Dinas Pariwisata Kabupaten Maros sudah maksimal dalam menggunakan Informasi dan teknologi dalam mempromosikan dan mengenalkan wisata Bantimurung dengan menggunakan sosial media dan memberikan gambaran semenarik mungkin guna menarik para pengunjung untuk berkunjung ke wisata Bantimurung. Strategi promosi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata dalam strategi promosi oleh tata pengadministrasian melalui media sosial, blog, media cetak dan elektronik, pemasangan bener dan spanduk, hingga event-event yang menjadi sasaran untuk pemasaran objek wisata. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Maros di Wisata Alam Bantimurung sudah cukup terpenuhi dan memudahkan proses kegiatan pariwisata dapat berjalan lancar peran pengelola dalam mengembangkan wisata khususnya penataan di lokasi Bantimurung sarana dan prasarana sudah sangat baik dan memuaskan pelayanan pengunjung.

## REFERENSI

- Munawar, A. (2019). *Potensi Wisata Alam dalam Kawasan Hutan, Pemanfaatan dan Pengembangan*. Makassar: Inti Mediatama
- Paradana, A., & Hamrun, H. (2021). Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Objek Wisata Karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(5), pp. 1813-1826.
- Aisyah, D. N. (2017). Analisis SWOT Sebagai Pertimbangan Menetapkan Strategi. *Simki-Economic*, 1(5).
- Rani, D. P. M., & Retnoningsih, E. (2014). Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus Pantai Lombang). *Jurnal Politik Muda*, 3(3), pp. 412-421.
- Firdausi, F., & AS, M. R. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Lembaga Pemerintahan Daerah (Studi Di Pemerintah Kabupaten Probolinggo). *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1), pp. 66-75.
- Harahap. (2015). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Depok: Rajawali pers.
- Prasetyo, A. H. (2017). Strategi Publik Relation Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Organisasi Publik. *JAMAK: Jurnal Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan*, 4(1), pp. 11-17.
- Itamar, H., Alam, A. S., & Rahmatullah, R. (2014). Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 91-108.
- Syah, M. A (2022). *Pariwisata dan Ketahanan Nasional Indonesia*. Jakarta: UNJ PRESS.

- Nawawi. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*.
- Pajriah, S. (2018). Peran Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Artefak*, 5(1), p. 25.  
<https://doi.org/10.25157/ja.v5i1.1913>
- Nugraha, Q. (2014). *Modul 1 Manajemen Strategis: Manajemen Strategis Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Rangkuti F. (2006). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Primadany, S. R. (2013). Analisis Strategi Pengembangan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(4).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Alfaberta.
- Sunarto. (2013). *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Dirjen Dikti Dependikbud.
- Yoeti, O. A. (1996). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Yusuf. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.